
PERANCANGAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGATURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Tanti Irnanda¹, Sri Astri Yani², Asmawati³, Nursuhaela⁴, Ummul Rabbayani Kalsum⁵,
Putri Pratiwi⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: nandamowewe1209@gmail.com

Abstrak

Secara strategis, rencana akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan rancangan peraturan daerah, termasuk peraturan yang mengatur izin pertambangan di daerah. Regulasi pertambangan telah berubah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini membawa konsekuensi yuridis, kebijakan, dan tata kelola di tingkat daerah. Untuk memastikan bahwa Raperda izin pertambangan tetap selaras dengan hukum nasional, memenuhi kebutuhan daerah, dan berfokus pada keadilan sosial dan keberlanjutan, diperlukan perencanaan akademik yang menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa perancangan naskah akademik Raperda mengenai izin pertambangan sebagai alat untuk mengatur pertambangan di daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan memeriksa literatur tentang peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa naskah akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan kualitas normatif, legitimasi, dan konsistensi Raperda. Ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional. Selain itu, tata kelola pertambangan daerah yang baik dapat dicapai melalui penggabungan dasar akademis dari bidang hukum, sosiologi, dan filosofi. Diharapkan penelitian ini akan memberikan referensi konseptual bagi pemerintah daerah dan pembentuk Perda saat mereka membuat rancangan akademik Raperda izin pertambangan yang sistematis, adaptif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Naskah Akademik, Raperda, Izin Pertambangan, Pemerintah Daerah, Tata Kelola Pertambangan.

Abstract

Strategically, an academic plan functions as a scientific foundation for the formulation of regional regulations, including regulations governing mining permits at the regional level. Mining regulations have undergone significant changes, particularly following the enactment of Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining. These changes have resulted in juridical, policy, and governance consequences for regional governments. To ensure that the draft regional regulation (Raperda) on mining permits remains aligned with national law, accommodates regional needs, and prioritizes social justice and sustainability, a comprehensive academic planning process is required. The objective of this study is to examine the design of the academic manuscript for the draft regional regulation on mining permits as an instrument for regulating mining activities at the regional level. This research employs a qualitative method using a normative juridical approach. The study is conducted through an analysis of literature on laws and regulations as well as other relevant scholarly sources. The findings indicate that the academic manuscript serves as a strategic instrument

to ensure the normative quality, legitimacy, and consistency of the draft regional regulation. It also functions as a bridge between regional interests and national policies. Furthermore, effective regional mining governance can be achieved through the integration of academic foundations from the fields of law, sociology, and philosophy. This study is expected to provide a conceptual reference for regional governments and regional regulation drafters in developing systematic, adaptive, and sustainable academic manuscripts for draft regional regulations on mining permits.

Keywords: *Academic Manuscript, Draft Regional Regulation (Raperda), Mining Permits, Regional Government, Mining Governance.*

A. PENDAHULUAN

Naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan peraturan daerah karena memuat studi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang diperlukan untuk merumuskan substansi pengaturan suatu masalah hukum secara menyeluruh. Menurut Sofwan et al. (2022), naskah akademik memuat penelitian tersebut sehingga menjadi komponen penting dalam proses penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, Sihombing et al. (2023) menjelaskan naskah akademik memberikan gambaran menyeluruh tentang latar belakang, tujuan penyusunan, materi dan ruang lingkup sebuah peraturan perundang-undangan, dan menjadi pertimbangan bagi eksekutif dan legislatif saat membuat keputusan.

Di Indonesia izin pertambangan adalah izin resmi yang harus dimiliki oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Regulasi terbaru telah mengubah aturan izin pertambangan secara signifikan. Perizinan pertambangan dalam hukum Indonesia tidak hanya menetapkan legalitas operasional, tetapi juga menunjukkan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta dampaknya terhadap tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan (Aulia et al., 2024).

Setelah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberlakukan, pemerintah pusat mengambil alih otoritas untuk menerbitkan izin pertambangan dari pemerintah provinsi. Akibatnya, pemerintah provinsi hanya diberi wewenang untuk mengawasi dan melaksanakan beberapa fungsi, yang berdampak pada bagaimana dan seberapa efektif pengelolaan izin di tingkat daerah. Kewenangan pengaturan izin pertambangan telah berubah, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ini telah menyebabkan pemerintah daerah kurang terlibat dalam pengelolaan izin pertambangan, dan perlunya harmonisasi kewenangan dan pengawasan terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat lokal (Utami, 2023). Selain itu, pertambangan sering menyebabkan konflik sosial dan dampak lingkungan yang signifikan di daerah-daerah tambang. Akibatnya, untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat lokal, perizinan dan penerapan kebijakan harus dikaji secara menyeluruh (Fauzi & Nulhaqim, 2023).

Pendekatan hukum normatif telah banyak digunakan dalam studi tentang pengaturan izin pertambangan di Indonesia setelah perubahan regulasi pertambangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana otoritas dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut penelitian Andriani & Kurdi (2024) penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah membatasi wewenang pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, untuk memberikan izin usaha pertambangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah, termasuk korupsi dan tumpang tindih izin. Selain itu, Dharma et al. (2019) menunjukkan bahwa setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otoritas izin pertambangan rakyat telah berpindah dari bupati atau wali kota ke gubernur.

Menurut Noverizky & Hikmah (2023) mempelajari dampak yuridis dari perubahan UU Minerba terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan sentralisasi kewenangan. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan manfaat pertambangan bagi masyarakat lokal (Cakranegara et al., 2023). Namun demikian, sebagian besar penelitian telah berfokus pada elemen kewenangan, implikasi normatif, dan pengaruh kebijakan pertambangan. Mereka belum secara khusus mempelajari perancangan naskah akademik sebagai dasar untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai izin pertambangan. Berdasarkan *state of the art* tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian (*research gap*), karena belum ada penelitian yang secara khusus mempertimbangkan naskah akademik Raperda sebagai objek utama dalam konteks pengaturan izin pertambangan daerah.

Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan bagaimana kewenangan dan implikasi yuridis Undang-Undang Minerba berubah, tanpa membahas bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan secara sistematis ke dalam naskah akademik Raperda tentang izin pertambangan sebagai instrumen pengaturan pertambangan. Akibatnya, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan konseptual dan analisis terhadap naskah akademik Raperda tentang izin pertambangan sebagai instrumen pengaturan (Rahayu & Faisal, 2021).

Berdasarkan analisis literatur hukum dan kebijakan pertambangan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan ide-ide dalam rancangan akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang izin pertambangan sebagai alat untuk mengatur pengaturan pertambangan di daerah. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam peraturan pertambangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dapat digunakan sebagai landasan untuk pembuatan naskah akademik Raperda yang responsif, sistematis, dan berorientasi pada kepentingan daerah dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, keberadaan pertambangan rakyat (IPR) juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah akademik Raperda izin pertambangan.

Rahayu & Faisal (2021) menegaskan bahwa perubahan regulasi pertambangan pasca revisi UU Minerba berdampak langsung terhadap eksistensi pertambangan rakyat, baik dari sisi legalitas, perlindungan hukum, maupun keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Pertambangan rakyat sering kali berada pada posisi rentan karena keterbatasan akses terhadap perizinan formal, pembinaan teknis, dan jaminan lingkungan yang memadai. Oleh sebab itu, naskah akademik Raperda perlu mengintegrasikan pengaturan yang memberikan kepastian hukum, pembinaan, serta perlindungan bagi pelaku pertambangan rakyat agar tidak terpinggirkan oleh sistem perizinan yang semakin terpusat dan kompleks. Dengan demikian, pengaturan daerah dapat berperan sebagai instrumen afirmatif yang menjembatani kepentingan negara, pelaku usaha besar, dan masyarakat penambang rakyat, sekaligus mendukung tata kelola pertambangan yang lebih inklusif dan berkeadilan (Rahayu & Faisal, 2021).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi literatur, karena penelitian ini berfokus pada penelitian konseptual dan normatif tentang rancangan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang izin pertambangan sebagai instrumen untuk pengaturan pertambangan daerah. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara menyeluruh berbagai konsep, kebijakan, dan peraturan yang terlibat dalam perancangan Raperda.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu, melihat hukum sebagai standar atau aturan yang berlaku dalam sistem hukum. Metode ini digunakan untuk menyelidiki sistem izin pertambangan yang terdiri dari Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan ketentuan yang berkaitan

dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode ini, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui posisi, fungsi, dan peran naskah akademik dalam pembuatan Raperda izin pertambangan di tingkat daerah.

Peneliti sendiri, sebagai instrumen penelitian, bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mempelajari, dan menafsirkan informasi penelitian. Untuk mengumpulkan data, studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder. Peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkaitan dengan pertambangan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk buku teks, artikel jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan izin pertambangan dan naskah akademik. Data ini dikumpulkan dari sumber yang dapat diakses secara publik.

Analisis data kualitatif-deskriptif melibatkan pengelompokan, penelitian, dan penafsiran. Untuk menemukan konsep, prinsip, dan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang diperlukan untuk perancangan naskah akademik Raperda tentang izin pertambangan, data dianalisis dengan melakukan analisis isi dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang menggambarkan konsep perancangan naskah akademik sebagai instrumen pengaturan pertambangan daerah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan Fungsi Naskah Akademik dalam Pembentukan Raperda

Naskah akademik dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah dokumen hasil penelitian ilmiah yang menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, ruang lingkup, dan dasar pemikiran yuridis, filosofis, dan sosiologis yang mendasari pembentukan aturan. Naskah akademik, menurut (Sofwan et al., 2022) adalah hasil penelitian atau penelitian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menguraikan masalah yang akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan menjadikannya solusi terhadap kebutuhan hukum masyarakat. Naskah akademik digunakan dalam kerangka ini tidak hanya sebagai pendahuluan administratif, tetapi juga sebagai dokumen penting yang menunjukkan fakta normatif dan sosial di balik kebutuhan regulasi yang akan dibuat. Salah satu tujuan utama naskah akademik adalah untuk memberikan landasan ilmiah dan normatif bagi proses pembentukan Raperda, sehingga materi kebijakan yang dirumuskan dalam Raperda memiliki legitimasi yang kuat dan konsisten secara hukum.

Naskah akademik, menurut mencakup gambaran latar belakang, tujuan penyusunan, substansi materi, dan elemen yuridis yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan eksekutif dan legislative (Sihombing et al., 2023). Oleh karena itu, naskah akademik berfungsi sebagai penghubung antara analisis akademik dan praktik hukum. Ini memastikan bahwa Raperda yang dibuat tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga sesuai dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Naskah akademik memiliki peran strategis dalam menjamin kualitas, legitimasi, dan konsistensi materi yang dimasukkan ke dalam Perda selama proses pembentukan peraturan daerah.

Naskah akademik berfungsi untuk mengontrol substansi regulasi sehingga Raperda tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pembentukan undang-undang yang baik (Sofwan et al., 2022). Naskah akademik memastikan bahwa peraturan dalam Perda memiliki dasar yang rasional, dapat diterima oleh masyarakat, dan sesuai dengan sistem hukum nasional melalui studi yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menyeluruh (Rahardjo & Herman, 2025). Oleh karena itu, naskah akademik yang direncanakan secara menyeluruh sangat penting untuk mencegah inkonsistensi norma, konflik regulasi, dan meningkatkan legitimasi hukum Perda yang dibuat.

2. Pengaturan Izin Pertambangan dalam Kerangka Hukum Nasional dan Daerah

Izin pertambangan (termasuk Izin Usaha Pertambangan atau IUP) dalam konteks hukum administrasi dan sumber daya alam Indonesia adalah alat hukum yang mengatur legalitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan batubara. Izin-izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola sumber daya alam yang baik. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), bersama dengan Peraturan Presiden mengatur sistem perizinan pertambangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa izin pertambangan tidak hanya bersifat administratif tetap juga memerlukan penyesuaian dengan prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang merupakan bagian penting dari hukum administrasi di industry (Aulia et al., 2024).

Proses pemberian izin pertambangan di Indonesia mengalami perubahan besar, terutama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Damanik et al., 2025). UU ini mereformasi undang-undang sebelumnya dan kemudian berkolaborasi dengan UU Pemerintahan Daerah, sehingga sekarang otoritas pemberian izin pertambangan berada di pemerintah pusat. Studi Wulandari & Fahrozi (2021) menemukan bahwa beberapa pasal dalam UU Minerba terbaru telah mengalihkan wewenang untuk mengeluarkan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang konsep otonomi daerah dan seberapa besar peran pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan pertambangan di wilayahnya sendiri. Perubahan undang-undang ini menunjukkan pergeseran paradigma dari desentralisasi ke arah sentralisasi dalam hal perizinan pertambangan. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional semakin mendominasi kebijakan daerah.

Setelah UU Minerba, struktur perizinan pertambangan berubah. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menimbulkan masalah dan konsekuensi terhadap gagasan desentralisasi dan kapasitas pemerintah daerah untuk membuat kebijakan lokal yang sesuai dengan konteks lokal. Tinanmbuan et al. (2025) mencatat bahwa meskipun prinsip desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri, sentralisasi wewenang pemberian izin pertambangan melalui Undang-Undang Minerba cenderung mengurangi kapasitas pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan pertambangan secara langsung. Akibatnya, peran pemerintah daerah sekarang lebih mirip dengan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka daripada membuat keputusan secara langsung. Ada dampak pada kebijakan daerah mengenai pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kebutuhan pembangunan lokal. Ini juga menimbulkan pembicaraan tentang perlunya mekanisme koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam tata kelola pertambangan Indonesia.

Selain itu, dalam perspektif hukum administrasi, izin pertambangan juga harus dipahami sebagai instrumen yang menyeimbangkan kewenangan negara dengan perlindungan hak-hak masyarakat (Damanik et al., 2025). menegaskan bahwa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukan sekadar tindakan administratif yang bersifat formal, tetapi merupakan keputusan tata usaha negara yang memiliki implikasi langsung terhadap ruang hidup masyarakat, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta keberlanjutan sosial-ekonomi di wilayah terdampak tambang. Oleh karena itu, negara melalui pemerintah pusat tetap berkewajiban menjamin partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan, meskipun kewenangan telah tersentralisasi. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat serta perlindungan terhadap hak masyarakat lokal, sentralisasi izin pertambangan berpotensi menimbulkan ketimpangan kepentingan antara negara, pelaku usaha, dan

masyarakat sekitar wilayah tambang, sehingga prinsip keadilan administratif dan good governance dalam pengelolaan sumber daya alam dapat terabaikan (Damanik et al., 2025).

3. Urgensi Perancangan Naskah Akademik Raperda tentang Izin Pertambangan

Secara filosofis, penciptaan draft akademik Raperda tentang izin pertambangan sangat penting karena desentralisasi pemerintah membutuhkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Filosofi otonomi daerah yang diabadikan dalam Konstitusi memberi ruang kepada daerah untuk mengelola kekayaan alamnya dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Secara yuridis, perubahan dalam otoritas pemberian izin pertambangan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menunjukkan bahwa dasar hukum daerah harus diperkuat untuk membuat kebijakan perizinan yang sesuai dengan hukum nasional sambil melindungi kepentingan konstitusional masyarakat lokal. Secara sosiologis, Raperda harus menunjukkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan upaya pengaturan perizinan agar kebijakan yang dibuat lebih responsif terhadap keadaan sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Jamil (2022) menemukan bahwa, ketika Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterapkan setelah UU Minerba, itu memiliki konsekuensi langsung terhadap otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. Dalam hal ini, daerah tidak memiliki kontrol penuh atas kegiatan pertambangan di wilayahnya, sehingga diperlukan *grounding* hukum yang kuat di tingkat daerah.

Dampak yang kompleks dari aktivitas pertambangan melintasi lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, sehingga pembuatan rencana akademik menjadi penting sebagai landasan ilmiah untuk pembentukan Raperda. Secara lingkungan, industri pertambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta masalah pemulihan pasca tambang. Untuk mengelola dampak lingkungan ini, diperlukan instrumen hukum khusus (Rahayu & Faisal, 2021). Faktor sosial sangat penting karena aktivitas pertambangan dapat menyebabkan konflik dengan masyarakat lokal, terutama terkait keterlibatan dan hak partisipasi dalam proses izin, termasuk dampak pada budaya dan mata pencaharian setempat. Secara ekonomi, pertambangan meningkatkan pendapatan, tetapi tanpa peraturan terarah di tingkat daerah, manfaat bagi masyarakat lokal sering tidak optimal. Selain itu, kompleksitas tata kelola menyebabkan lembaga yang berwenang menghadapi kesulitan untuk menjangkau kegiatan di lapangan, yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan yang tidak efisien.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Aulia et al. (2025) perubahan dalam otoritas penerbitan izin menyebabkan pergeseran otoritas dan masalah koordinasi. Ini berdampak pada seberapa efektif pengawasan dan pelaksanaan izin di tingkat daerah dan menimbulkan pembicaraan tentang perlunya tata kelola yang lebih sesuai dengan keadaan lokal. Dalam pengaturan izin pertambangan, perancangan naskah akademik sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika kewenangan pemberian izin dipusatkan, konflik normatif dan implementatif sering muncul. Kebutuhan dan kondisi di daerah berbeda-beda, sehingga tanpa dasar akademik yang kuat, rancangan perda rentan menimbulkan kebijakan yang tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kebutuhan lokal.

Aulia et al. (2025) menyatakan bahwa penarikan otoritas perizinan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 telah menyebabkan ketegangan struktural, ketidakpastian hukum, dan hambatan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan daerah untuk mengelola konflik yang muncul dari manajemen pertambangan dan kurangnya kemampuan daerah untuk mengelola izin. Oleh karena itu, naskah akademik berfungsi sebagai alat pencegahan dan harmonisasi, memberikan analisis menyeluruh tentang ruang lingkup kebijakan, pembagian kewenangan, dan rekomendasi normatif untuk harmonisasi hukum nasional dan lokal. Ini membantu mengurangi konflik kewenangan.

4. Prinsip-Prinsip Perancangan Naskah Akademik Raperda Izin Pertambangan

Untuk memastikan bahwa Perda izin pertambangan memiliki kualitas normatif dan implementatif yang memadai, rancangan akademik Raperda izin pertambangan harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, prinsip-prinsip seperti keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kesesuaian antara jenis dan materi muatan digunakan sebagai pedoman utama dalam pembentukan standar hukum yang efektif. Penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai alat untuk mengontrol kualitas hukum sehingga produk hukum tidak ambigu, tumpang tindih, atau sulit diterapkan di masyarakat (Hadi et al., 2024). Oleh karena itu, naskah akademik berfungsi sebagai fondasi ilmiah yang memastikan bahwa Raperda izin pertambangan disusun secara sistematis, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar (Rahardjo & Herman, 2025).

Mengingat bahwa pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat, prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial adalah komponen penting dalam penyusunan Raperda izin pertambangan. Sementara prinsip keadilan sosial menuntut perlindungan hak dan kepentingan masyarakat di sekitar wilayah tambang, prinsip keberlanjutan menuntut pengelolaan sumber daya mineral dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan generasi mendatang. Widyaningrum & Hamidi (2024) menemukan bahwa pengaturan pertambangan yang berkelanjutan harus dimasukkan sejak tahap perumusan kebijakan melalui naskah akademik. Ini dilakukan agar standar yang dibuat dapat mencegah kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, naskah akademik berfungsi sebagai alat strategis untuk menanamkan prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam konten Raperda.

Untuk menjamin legitimasi demokratis dan efektivitas implementasi peraturan, rencana akademik Raperda izin pertambangan juga harus dibuat berdasarkan prinsip kepastian hukum, partisipasi publik, dan akuntabilitas (Damanik et al., 2025). Keamanan hukum menjamin bahwa standar yang dibuat tidak disalahartikan dan memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, sedangkan partisipasi publik memungkinkan orang-orang di seluruh negara untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Rohinun et al. (2023) menekankan bahwa keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan komponen penting untuk meningkatkan akuntabilitas pembentuk kebijakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk hukum yang dibuat.

Oleh karena itu, naskah akademik membantu proses legislasi daerah menjadi lebih jelas dan bertanggung jawab. Karena pengaturan pertambangan berada dalam kerangka hukum nasional yang hierarkis, namun harus mempertimbangkan situasi lokal, prinsip keselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah sangat penting saat membangun naskah akademik Raperda izin pertambangan. Naskah akademik berfungsi untuk menjembatani kepentingan nasional yang diatur undang-undang dengan kebutuhan daerah yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan lingkungan yang berbeda. Parlindungan (2017) menyatakan bahwa peraturan daerah yang baik harus disesuaikan dengan kebijakan pusat agar tidak menimbulkan konflik kewenangan atau disharmonisasi norma. Mereka juga harus memungkinkan daerah untuk mengatur kepentingannya secara kontekstual. Oleh karena itu, naskah akademik memainkan peran strategis dalam menjamin bahwa Raperda izin pertambangan relevan secara horizontal dan vertikal dengan kebutuhan daerah.

Selain itu, dinamika kebijakan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa naskah akademik Raperda izin pertambangan perlu memuat analisis perkembangan kebijakan hukum secara komprehensif dan adaptif. Rahardjo & Herman (2025) menjelaskan bahwa kebijakan hukum pertambangan di daerah terus

mengalami penyesuaian seiring perubahan regulasi nasional, perkembangan kebutuhan pembangunan daerah, serta meningkatnya tuntutan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, naskah akademik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung normatif, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif yang memetakan tantangan implementasi, potensi konflik kewenangan, serta peluang harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan memasukkan dinamika kebijakan tersebut, Raperda izin pertambangan dapat dirancang lebih responsif, kontekstual, dan mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan daerah tanpa mengabaikan kerangka hukum nasional serta prinsip tata kelola pertambangan yang berkelanjutan dan berkeadilan (Rahardjo & Herman, 2025).

5. Integrasi Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Naskah Akademik

Prinsip konstitusional bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah landasan filosofis dalam perancangan naskah akademik Raperda izin pertambangan, yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3). Hamzah (2019) mengatakan bahwa pengelolaan kekayaan alam, termasuk kekayaan yang berasal dari sektor pertambangan, harus diatur untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi negara. Dengan memadukan tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembagian keuntungan yang adil kepada masyarakat lokal sebagai landasan normatif dan etis untuk regulasi pertambangan, ini menjadi filosofi dasar dalam pembentukan naskah akademik. Sangat penting untuk memiliki landasan yuridis dalam memastikan bahwa naskah akademik Raperda izin pertambangan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan pertambangan harus sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menetapkan penguasaan negara atas sumber daya alam (Widyaningrum & Hamidi, 2024). Mereka juga menyatakan bahwa pengaturan ini harus sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 23 Tahun 2014, yang merupakan sumber utama dari peraturan pelaksana lainnya yang digunakan dalam pembuatan Raperda. Untuk memastikan bahwa aturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tetap memenuhi prinsip-prinsip hukum administrasi yang baik, dasar yuridis ini sangat penting.

Untuk membuat regulasi yang dibuat bersifat kontekstual dan responsif, pemahaman tentang keadaan nyata masyarakat dan wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan sangat penting, menurut landasan sosiologis yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Raperda izin pertambangan. Studi menunjukkan bahwa pengabaian terhadap hak masyarakat lokal, masalah penguasaan lahan, dan ketidakseimbangan dalam pembagian keuntungan ekonomi adalah faktor yang sering menyebabkan konflik sosial di industri pertambangan. Konflik pertambangan biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat yang tinggal di sekitar tambang, terutama terkait hak atas tanah dan dampak lingkungan (Safa'at & Qurbani, 2017). Partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses perizinan dan pengambilan kebijakan memperparah hal ini. Pertambangan memiliki dampak sosial dan ekonomi yang rumit bagi masyarakat lokal, termasuk perubahan struktur mata pencaharian dan peningkatan ketegangan sosial (Karsadi & Aso, 2023). Oleh karena itu, rencana akademik Raperda izin pertambangan harus mencakup studi sosiologis yang mencakup kondisi demografis, sosial-ekonomi, dan budaya serta kemungkinan konflik masyarakat sebagai dasar untuk menciptakan kebijakan izin yang berkelanjutan, adil, dan partisipasi.

6. Naskah Akademik sebagai Instrumen Pengaturan Pertambangan Daerah

Naskah akademik memberikan justifikasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendalam terhadap masalah yang akan diatur serta solusi normatif yang ditawarkan, ia berfungsi sebagai fondasi ilmiah strategis untuk merancang substansi Raperda. Naskah akademik terdiri dari hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

mengenai latar belakang dan urgensi materi hukum yang akan diatur dalam Raperda (Sofwan et al., 2022). Tujuan dari naskah akademik adalah untuk meningkatkan kualitas, legitimasi, dan relevansi substansi regulasi sehingga menjadi lebih kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Studi ini membantu pembentuk kebijakan membuat pasal-pasal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan preseden hukum lokal. Untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah, rencana akademik sangat penting, terutama ketika isi Raperda dimasukkan ke dalam konteks yang sudah diatur secara nasional, seperti perizinan pertambangan. Pembuatan naskah akademik di pemerintahan kota Medan memerlukan kerja sama dengan DPRD dan Kemenkumham untuk memberikan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk setiap proposal kebijakan, sehingga sesuai dengan kebijakan pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal (Pasaribu & Sihotang, 2025). Proses presentasi naskah akademik, juga dikenal sebagai *manuscript hearings*, memungkinkan untuk menilai sejauh mana isi Raperda mempertimbangkan tuntutan nasional tanpa mengabaikan keinginan dan konteks masyarakat lokal.

Naskah akademik memastikan bahwa regulasi pertambangan di tingkat daerah dirancang berdasarkan bukti empiris, analisis hukum, dan kajian nilai sosial, sehingga kebijakan yang dibuat lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap perubahan lokal dalam konteks manajemen penambangan yang baik. Konsep tata kelola penambangan yang baik menekankan bahwa bagian dari tata kelola yang baik harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup di daerah pertambangan. Pendekatan integratif ini dilakukan melalui naskah akademik dalam pembuatan Raperda yang efektif (Tanzil et al., 2021). Konflik sosial, tumpang tindih kewenangan, dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku usaha pertambangan sering disebabkan oleh kurangnya dasar akademik dalam regulasi pertambangan (Safa'at & Qurbani, 2017). Oleh karena itu, memasukkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis ke dalam struktur akademik merupakan langkah strategis yang penting untuk mencegah ketidaksesuaian dalam peraturan, memperkuat sistem kontrol publik, dan mendorong semua pihak yang terlibat untuk mencapai tata kelola pertambangan daerah yang adil dan berkelanjutan.

7. Implikasi Perancangan Naskah Akademik terhadap Pembentukan Raperda Izin Pertambangan

Karena berfungsi sebagai pedoman utama untuk memastikan bahwa Raperda disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti keterpaduan norma, kesesuaian hierarki, dan kejelasan tujuan, perancangan naskah akademik memberikan implikasi normatif yang signifikan bagi pembentuk Perda. Adanya naskah akademik membantu para pembuat undang-undang membuat standar yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi (Sofwan et al., 2022). Ini juga membantu mereka menghindari konflik normatif dan cacat yuridis dalam substansi undang-undang. Dalam hal izin pertambangan, implikasi normatif ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengaturan daerah tidak melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang sektoral, terutama UU Minerba dan UU Pemerintahan Daerah, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dari perspektif kebijakan, perancangan naskah akademik berdampak positif karena keputusan pengaturan dibuat berdasarkan penelitian ilmiah dan analisis kebutuhan daerah. Naskah akademik berfungsi sebagai alat kebijakan strategis untuk menjembatani kebijakan nasional dengan kepentingan daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki dasar rasional dan argumentatif untuk menetapkan kebijakan melalui Perda (Pasaribu & Sihotang, 2025). Dalam konteks izin pertambangan, naskah akademik membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal tanpa mengabaikan kerangka kebijakan nasional. Secara praktis, pembuatan rencana akademik berdampak langsung pada

kelangsungan pengelolaan pertambangan daerah karena mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pertambangan yang baik, yaitu tata kelola pertambangan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Kebijakan pertambangan yang didasarkan pada kualitas pemerintahan yang baik dapat mengurangi konflik sosial, meningkatkan perlindungan lingkungan, dan meningkatkan kendali pemerintah atas aktivitas pertambangan (Tanzil et al., 2021). Naskah akademik berfungsi sebagai alat pencegahan dalam Raperda izin pertambangan, membantu pemerintah daerah membuat undang-undang yang berkeadilan sosial dan berkelanjutan yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam di daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rancangan akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang izin pertambangan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mengatur pengaturan pertambangan daerah. Rancangan akademik berfungsi sebagai fondasi ilmiah dan normatif yang mengintegrasikan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam proses pembuatan Perda, sehingga peraturan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum, konsistensi normatif, dan konsistensi dengan undang-undang yang berlaku. Naskah akademik sangat penting dalam konteks perubahan otoritas perizinan pertambangan setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Ini akan memastikan bahwa pengaturan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, perlindungan lingkungan, dan otonomi daerah. Selain itu, perancangan naskah akademik yang menyeluruh memiliki banyak manfaat. Ini termasuk manfaat normatif bagi pembentuk Perda dalam mencegah ketidakseimbangan peraturan, manfaat kebijakan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang didasarkan pada penelitian ilmiah dan kebutuhan lokal, dan manfaat praktis bagi keberlanjutan pengelolaan pertambangan daerah melalui penerapan prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Oleh karena itu, naskah akademik tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pendukung administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun regulasi pertambangan daerah yang adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Studi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas perancangan naskah akademik sangat penting untuk membuat Raperda izin pertambangan yang efisien dan responsif terhadap perubahan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, R., & Kurdi, S. (2024). Regional Government Authority Regarding Mineral and Coal Mining Business Licenses in Indonesia based on Law Number 3 of 2020. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(1), 94–110.
- Aulia, K., Ginting, B., Siregar, M., & Sukarja, D. (2024). Implementation of Mineral and Coal Mining Licensing In Indonesia After Presidential Regulation of 2022. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 72–82.
- Aulia, W. N., Faqih, M. A., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Efektivitas Kebijakan Hukum Mengenai Penyelesaian Konflik Pertambangan Antara Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 2(4), 1–11.
- Cakranegara, P. A., Rahadi, D. R., & Susilowati, E. (2023). Distribution of Authority for Mining Business Permits between the Central Government and Regional Governments After the Enactment of the Minerba Law Number 4 of 2009. *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 1(02), 88–96.
- Damanik, H., Fransisco, W., & Wahyudi, F. S. (2025). Mining Business Licenses in the Perspective of Administrative Law Between State Authority and Community

- Rights. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 2(5), 29-38.
- Dharma, M. P. P., Husni, L., & Sahnan. (2019). Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilsn*, 7(1), 88–96.
- Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2023). Masalah Konflik Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 34–41.
- Hadi, M. S. A., Amalia, R., & Efendy, N. (2024). Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pedoman Kualitas Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 1–11.
- Hamzah, H. (2019). Politik hukum sumber daya alam. *Jurisprudentie*, 6(2), 276–290.
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2), 285–306.
- Karsadi, & Aso, L. (2023). Multidimensional Impacts of Nickel Mining Exploitation towards the Lives of the Local Community. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 222–227.
- Noverizky, A., & Hikmah, F. (2023). The Legal Aspects of Regulating the Submission of Mining Business Permits in the Perspective of the Mineral and Coal Mining Law. *UIRLawReview*, 97–106.
- Parlindungan, G. T. (2017). Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 384–400.
- Pasaribu, F., & Sihotang, J. (2025). The role of the legal division of the Medan City government in the preparation of academic manuscripts for draft regional. *Private Social Sciences Journal*, 5(11), 339–346.
- Rahardjo, A., & Herman, K. M. S. (2025). Dynamics of the Development of Mineral and Coal Mining Legal Policy Management by Regional Governments. *Asian Journal of Social and Humanities*, 3(10), 1771-1781.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Eksistensi pertambangan rakyat pasca pemberlakuan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan Batubara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 337-353.
- Rohinun, F. N. A., Riyadly, A. M., Gunawan, T., & Jannani, N. (2023). Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(1), 139–165.
- Safa'at, R., & Qurbani, indah D. (2017). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan (Studi di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur). *UJrnal Konstitusi*, 14(1), 150–167.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20.
- Sofwan, Rusnan, & Amalia, R. A. (2022). Pentingnya Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Jurnal Diskresi*, 1(1), 17–27.
- Tanzil, M., Rahimallah, A., Pratiwi, A. D., & Kusmin, A. F. (2021). Pengelolaan Minerba Dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik). *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 4(1), 34–54.
- Tinanmbuan, H. S. R., Istislam, Hadiyantina, S., Kusumaningrum, A., & Tajudin, A. A. (2025). Recentralization of Mining Licensing Authority and Its Impact on Local Autonomy in Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 7(2), 520–239.
- Utami, N. E. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. *LEX Renaissance*, 8(2), 360–378.